



**LAPORAN KELOMPOK III
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

**DISUSUN OLEH:
KELOMPOK III**

- 1. Ketua : Dr. Dikko Alrahman, S.I.A., M.E.**
- 2. Wakil Ketua : Budi Yanto, SE**
- 3. Sekretaris : Dian Yuti Rolanda, S.STP, MM**
- 4. Bendahara : Desty Tirtayana Elha, SE, MM**
- 5. Humas : Amrullah, SE**
- 6. Dokumentasi : Rangga, SH, M.Si**
- 7. Anggota : 1. Rafika Helda, SE, MM**
2. Dedy Hartono, S.Sos, MM
3. Fera Sari, SH, MH



**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN V
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI KOTA BATAM
TAHUN 2024**

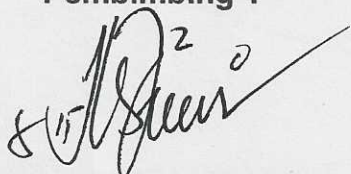
**LEMBAR PENGESAHAN
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

Batam, Agustus 2024

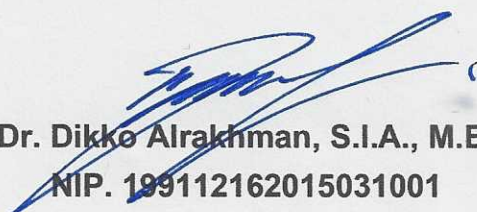
Disetujui

Pembimbing 1



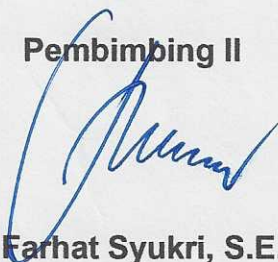
**Dra. Sugiasuti, S.S., M.M.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 196307091990032006**

Ketua Kelompok III



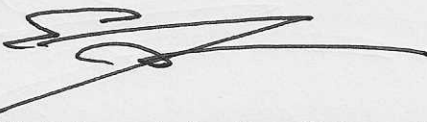
**Dr. Dikko Alrahman, S.I.A., M.E.
NIP. 199112162015031001**

Pembimbing II



**Dr. H. Farhat Syukri, S.E., M.Si.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 196308151983021002**

**MENGESAHKAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



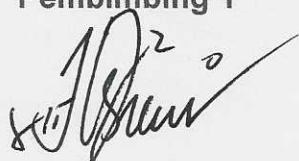
**Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP 197507071997031003**

**LEMBAR PERSETUJUAN
STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

Batam, Agustus 2024

**Disetujui
Pembimbing 1**



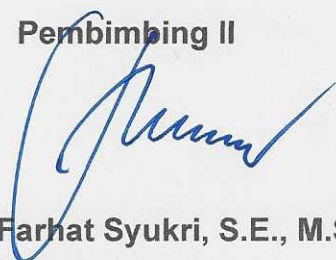
**Dra. Sugiastuti, S.S, M.M.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 196307091990032006**

Ketua Kelompok III



**Dr. Dikko Alrahman, S.I.A., M.E.
NIP. 199112162015031001**

Pembimbing II



**Dr. H. Farhat Syukri, S.E., M.Si.
Widyaiswara Ahli Utama
NIP. 196308151983021002**

**MENGETAHUI DAN MENYETUJUI
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM,**



**Riana Manurung, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 197005151997032001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat hidayah-Nya jua sehingga dapat disusunnya Laporan Studi Lapangan Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Laporan Studi Lapangan Kinerja ini disusun dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas dikutsertakannya kami dalam PKA Angkatan V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
2. Tri Hartati, SE, MM selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas bantuan dan fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan PKA Angkatan V Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024.
3. Riama Manurung, SH, MH Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam beserta Jajarannya atas sambutan, fasilitasi dan sharing informasi selama studi lapangan.
4. Dra. Sugiastuti, S.S., M.M. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan Laporan Studi Lapangan Kinerja Organisasi yang kami lakukan.
5. Edwin Meidiansyah, S.Pd.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan laporan Studi lapangan Kinerja Organisasi yang kami lakukan.
6. Semua Tim Panitia PKA Angkatan V Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
7. Semua pihak yang ikut membantu hingga tersusunnya Laporan Studi Lapangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Kami menyadari Laporan Hasil Studi Lapangan Kinerja Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan sarannya sangat diperlukan agar laporan ini menjadi lebih baik.

Batam, Agustus 2024

Ketua Kelompok III,



Dr. Dikko Alrahman, S.I.A., M.E.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
A. PROFIL ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM.....	1
1. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.....	1
2. Kondisi Geografi dan Demografi	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	6
B. DESKRIPSI KINERJA ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM	14
1. Visi dan Misi Kota Batam.....	14
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	18
3. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	19
4. Gambaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.....	20
C. KEUNGGULAN (KEY SUCCES FACTORS) STRATEGI DAN MANAJEMEN KINERJA PELAYANAN PUBLIK.....	21
1. Keunggulan Strategi.....	21
2. Manajemen Kinerja Pelayanan Publik.....	23

D. KEBERLANGSUNGAN KEUNGGULAN STRATEGI DAN MANAJEMEN KINERJA PELAYANAN PUBLIK.....	26
E. <i>LESSON LEARNT</i> HASIL STUDI LAPANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM	28
1. PERAN KEPEMIMPINAN.....	28
2. INOVASI PELAYANAN	29
3. KOMPETENSI DAN PEMBERDAYAAN SDM	32
4. PEMBANGUNAN JEJARING KERJA DAN KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN	33
5. PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA.....	34
6. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO.....	35
7. PLANNING and BUDGETING.....	38
8. PEMANFAATAN TEKNOLOGI.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	18
Tabel 2	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	19
Tabel 3	Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2022	21
Tabel 4	Prioritas Program Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	23
Tabel 5	Pemetaan Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021 - 2026	27
Tabel 6	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Batam Menurut Golongan.....	33
Tabel 7	Register Resiko Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun Anggaran 2024	37
Tabel 8	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021 - 2026	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Administrasi Kota Batam	4
Gambar 2	Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	8
Gambar 3	Halaman Utama Aplikasi SILELAPORMAS.....	30

A. PROFIL ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

1. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Kota Batam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Batam adalah salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Riau dan merupakan sebuah pulau di antara 329 pulau yang terletak di antara Selat Malaka dan Selat Singapura yang secara keseluruhan yang membentuk wilayah Batam. Langkanya catatan tertulis tentang pulau ini, dimana hanya ada satu literatur yang menyebut nama Batam, yaitu Traktat London yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan antara Belanda dan Inggris. Namun, menurut para pesiar dari China, pulau ini sudah dihuni sejak 231 Masehi ketika Singapura masih disebut Pulau Ujung.

Sebelum mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut kehidupan. Namun, terdapat beberapa kelompok penduduk yang lebih dahulu mendiami pulau ini. Mereka berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam. Mereka sama sekali tidak banyak terlibat dalam mengubah bentuk fisik pulau ini yang merupakan hamparan hutan belantara.

Pada dekade 1970-an, Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka kemudian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam didukung dan dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau

sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) sebagai penggerak pembangunan Batam.

Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam (BP Batam). Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP Batam).

Selanjutnya, dilihat dari sejarah perkembangan perangkat daerah Kota Batam yang salah satunya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam maka dapat ditinjau dari dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Pada Tahun 2001 melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah Kota Batam, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam terdiri dari Badan dan Kantor. Salah satu kantor yang dibentuk adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Batam yang mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Batam di bidang Kesatuan Bangsa.
- Pada tahun 2003 melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, maka dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah Kota Batam yang merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

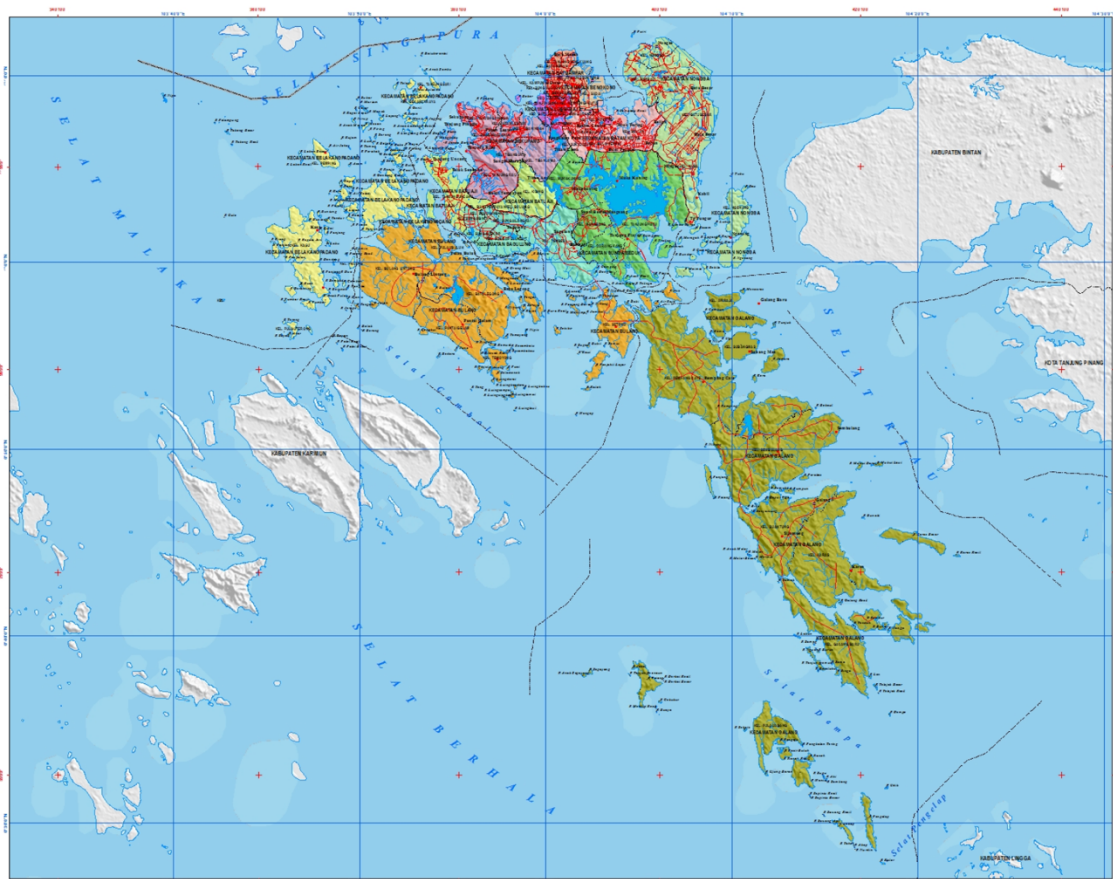
- Pada tahun 2007 melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Kota Batam berganti nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- Pada tahun 2014 melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berganti nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan lembaga teknis daerah Kota Batam.
- Pada Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menjadi badan daerah Tipe A yang tugasnya menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Kondisi Geografi dan Demografi

Kota Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau, di mana Kota Batam terletak di Pulau Batam. Pulau Batam terkoneksi dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang melalui jembatan Bareleng. Secara Geografis, Pulau Batam sangat berdekatan dengan negara Singapura, Malaysia dan Pulau Bintan. Pulau Batam juga merupakan kawasan perdagangan bebas (FTZ = *Free Trade Zone*), kawasan Sijori (Singapura, Johor (Malaysia), dan Kepulauan Riau (Indonesia), dan juga kawasan dari wilayah metropolitan Batam Raya (Batam, Bintan, Karimun, Tanjungpinang).

Wilayah administrasi Kota Batam secara astronomis terletak pada koordinat geografis 0°25'29" sampai dengan 1°15'00" Lintang Utara dan 103°34'35" sampai dengan 104°26'04" Bujur Timur. Lebih lanjut, mengacu pada peta di atas, dapat

diketahui bahwa secara geografis mempunyai letak yang strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional, di sebelah Utara wilayah Kota Batam berbatasan dengan selat Singapura, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun, kemudian di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan. Letaknya yang sangat strategis menjadikan daerah ini selanjutnya ditetapkan sebagai daerah khusus yang dikembangkan sebagai daerah industri, perdagangan dan pariwisata. Kota Batam juga ditetapkan sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB). Adapun peta administratif Kota Batam dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau

Gambar 1
Peta Wilayah Administrasi Kota Batam

Luas Wilayah Kota Batam sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 adalah 1.034.732 Km². Bentuk Wilayah Batam yang terdiri atas gugusan kepulauan sangat berpotensi untuk membangun industri maritim. Wilayah Kota Batam secara geografis berada di perairan laut dangkal, di mana terdapat 370 buah pulau besar dan kecil. Pulau-pulau tersebut pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur, serta Karimun di bagian selatan. Adapun urutan beberapa pulau dari yang besar sampai terkecil antara lain di Kecamatan Bulan terdapat Pulau Buluh, di Kecamatan Galang terdapat Pulau Karas, Pulau Galang Baru, Pulau Rempang, Pulau Air Raja, Pulau Subang Mas dan Pulau Abang. Secara administratif Kota Batam terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dengan 9 (sembilan) kecamatan berada di daerah perkotaan (Pulau Batam) sedangkan 3 (tiga) kecamatan berada di daerah kepulauan. Jumlah kelurahan di seluruh kecamatan mencapai 64 (enam puluh empat) kelurahan.

Posisi Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, Wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa. Hal ini dikarenakan ketersediaan sumber daya lahan dan tenaga kerja yang cukup serta adanya kemudahan investasi yang diberikan.

Lebih jauh lagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kota Batam ditetapkan untuk pengembangan prioritas nasional sektor industri dan pariwisata, yakni pengembangan Integrasi Kawasan Industri Batam-Bintan, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) TWA Muka Kuning, Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya. Adapun diversifikasi jenis pariwisata yang akan ditingkatkan mencakup: (1) wisata alam (ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (heritage tourism, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata kota yang difokuskan pada Cultural Heritage Regeneration, dan wisata desa); (3) wisata buatan (*meeting-incentive-convention-exhibition/MICE*,

yacht and cruise, wisata kebugaran/ *wellness tourism*, wisata kesehatan/*medical tourism*, dan wisata olahraga).

Dalam perspektif keamanan dan pertahanan Nasional, Kota Batam sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga, sekaligus sebagai pintu masuk kunjungan wisatawan mancanegara terbesar setelah Jakarta dan Bali memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara. Konsekuensi logis dari hal tersebut, segala aspek yang berpotensi mengganggu keamanan dan pertahanan di Wilayah Batam menjadi prioritas di tingkat nasional. Hal ini semakin memantapkan Kota Batam sebagai kota yang kondusif, aman dan nyaman.

Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari multi suku yang ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Jumlah penduduk Kota Batam pada tahun 2022 berjumlah sebesar 1.269.413 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 646.639 jiwa dan perempuan sebanyak 622.774 jiwa. Jika dilihat dari penyebaran penduduk pada tahun 2022, penduduk Kota Batam terpadat masih berada di wilayah kecamatan *mainland* yaitu Kecamatan Sagulung dan Batam Kota sedangkan yang terendah berada pada wilayah kecamatan *hinterland* yaitu Kecamatan Bulang dan Galang. Sementara jika dilihat jumlah penduduk Kota Batam pada tahun 2022 menurut kelompok umur, diketahui bahwa penduduk usia balita dan anak-anak (<15 tahun) tercatat sebesar 27,36%, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,59%, dan penduduk usia tua (tidak produktif/≥65 tahun) pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,03%.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas lain yang diberikan Wali Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi yaitu:

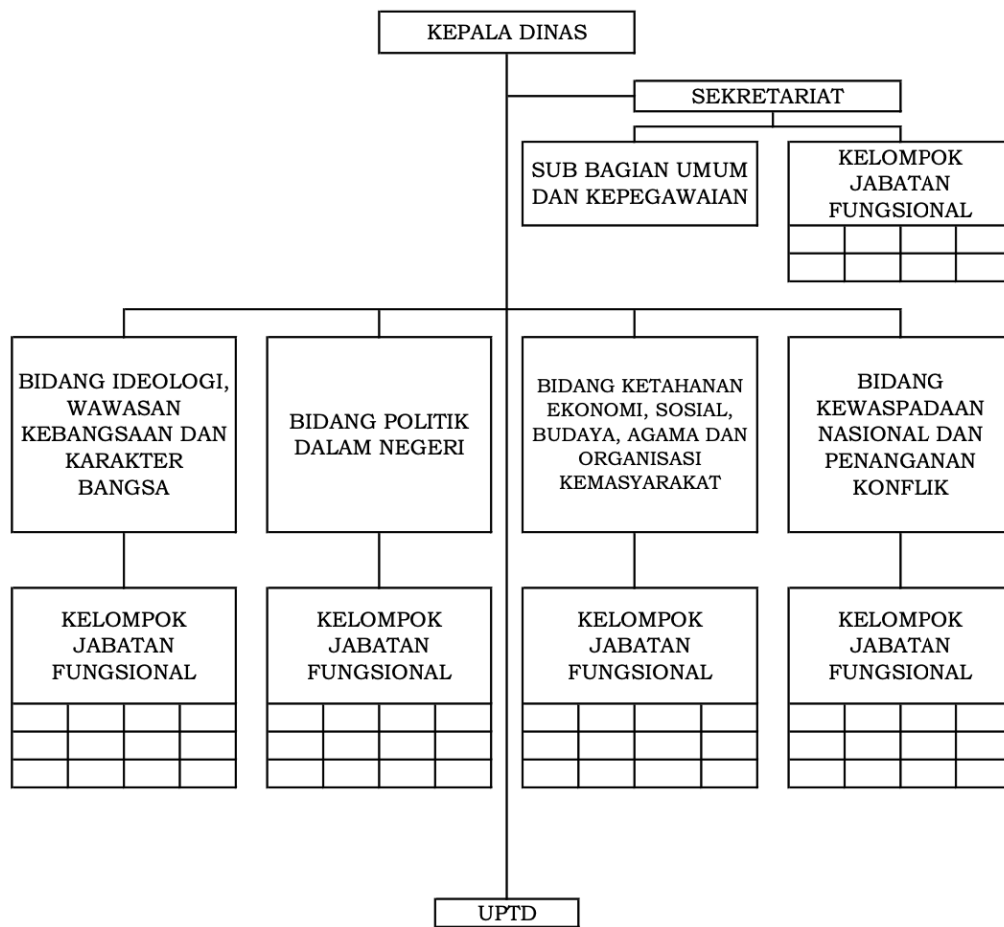
- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat dilihat pada Gambar 2.



WALI KOTA BATAM
 dto
 MUHAMMAD RUDI

Sumber: Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan

Gambar 2
Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batam

Adapun, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan, pembinaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan Badan sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3) Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4) Penyelenggaraan koordinasi, konsolidasi, dan konsultasi kesatuan bangsa dan politik dengan instansi terkait di Daerah maupun dengan Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- 5) Pelaksanaan pembagian tugas, pembinaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap bawahan atas pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;

- 6) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pada Badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkup Badan;
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan;
- 3) Pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkup Badan;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan, dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
- 5) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN;
- 6) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang dan UPTD;
- 7) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

c. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- 4) Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, Karakter Bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

d. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Politik Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
2. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,

perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

e. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- 3) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- 4) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan ketahanan

- ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan;
- 5) Penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
 - 6) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - 7) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - 8) Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan;

f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Dalam melaksanakan

tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;
- 4) pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di Daerah;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan;

B. DESKRIPSI KINERJA ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

1. Visi dan Misi Kota Batam

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam periode 2021-2026

sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG
MODERN DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan ke dalam misi. Adapun misi pembangunan daerah Kota Batam lima tahun mendatang (periode 2021-2026) telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut.

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diverifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "*center of excellence*" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktivitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok Visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta *centre of excellence* di Asia

Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.

3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.
4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah *hinterland* untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah *hinterland*, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah *mainland*/kota.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep *civil society* yang tetap

mengedepankan sikap religius. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Pencapaian visi dan misi Kota Batam tentunya didukung oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang berjumlah sebanyak 44 OPD, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Kecamatan.

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mendukung pelaksanaan misi ke 3 yaitu “Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam. Dari kelima Misi RPJMD Kota Batam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara khusus menunjang tercapainya misi dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertaqwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera (tujuan 3.1)
2. Meningkatnya kerukunan dan ketenteraman hidup masyarakat (sasaran 3.1.5). Ukuran ketercapaian sasaran adalah persentase penurunan berbagai potensi konflik maupun pelanggaran di Kota Batam, yang selaras dengan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera		Persentase Penurunan Konflik	11,10%	12,50%	14,30%	16,70%	20%	25%
1.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian	95%	95%	95%	95%	95%	95%
2.	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila	Persentase Masyarakat yang terbina dalam Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila	95%	95%	95%	96%	96%	97%
3.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	1. Angka Partisipasi dalam Pemilu Pileg, Pilpres	-	-	-	77%	-	-
		2. Angka Partisipasi dalam pemilu Pilkada	-	-	-	77%	-	-
		3. Persentase masyarakat dan partai politik yang dibina	-	95%	96%	97%	97%	98%
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ormas yang dibina	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat	95%	95%	95%	95%	95%	95%
5.	Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, gotong royong, kerukunan masyarakat dan toleransi masyarakat	Persentase Penanganan Konsolidasi Kerukunan antar Agama	95%	95%	96%	100%	100%	100%

6.	Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini.	75%	75%	90%	90%	90%	90%
		Persentase potensi konflik yang terselesaikan	80%	80%	90%	95%	95%	90%

Sumber: Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026

3. Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran mikro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rancangan RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	FORMULASI/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Optimalnya Kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	Penilaian SOP, SPM dan Ketaatan Peraturan Perundang – Undangan secara mandiri/internal	KESBANGPOL	SEKRETARIS
2.	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila	Persentase Masyarakat mendapatkan Pendidikan wasbang dan ideologi Pancasila	Jumlah mesyarakat yang mendapatkan Pendidikan wasbang dibagi jumlah sasaran Masyarakat yang mendapat Pendidikan wasbang x 100%	KESBANGPOL	KABID WASBANG
3.	Meningkatkan peran serta masyarakat bdalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	1. Persentase partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan pemilukada	Jumlah peserta pemilih tahun n dibagi jumlah pemilih tahun dikali 100 %	KPU	KABID POLITIK
		2. Partisipasi pemilih pemula	Jumlah Masyarakat telah berumur 17	KESBANGPOL	KABID POLITIK

			tahun sampai tahun 2024 dibagi jumlah Masyarakat yang memilih		
4.	Terwujudnya Masyarakat cerdas kehidupan berorganisasi berbangsa dan bernegara	Persentase organisasi Masyarakat yang terdaftar/terferivikasi di Kesbangpol	Jumlah ormas patuh pelaporan tahun n dibagi jumlah total ormas terdaftar tahun n dikali 100%	KESBANGPOL	KABID KETAHANAN EKONOMI, SENI DAN BUDAYA
5.	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan dan berideologi Pancasila	1. Jumlah kebijakan Bersama FKUB yang dihasilkan. 2. Indeks kerukunan hidup beragama di Kota Batam	1. jumlah kebijakan Bersama FKUB 2. Indeks kerukunan hidup beragama	1. KESBANGPOL 2. FKUB 3. KEMENAG	KABID KETAHANAN EKONOMI, SENI DAN BUDAYA
6.	Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	1. Persentase konflik yang terselesaikan 2. Masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini	1. Jumlah konflik yang terdeteksi di kali 100 % 2. Jumlah Masyarakat mengikuti sosialisasi yang ditargetkan	KESBANGPOL	KABID WASNAS

4. Gambaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2023 diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh nilai AKIP tahun 2022 sebesar 66,22 sehingga mendapat penilaian dengan kategori “B’ (Baik). Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Nilai AKIP merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2022

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1.	Perencanaan Kinerja	30%	23,51
2.	Pengukuran Kinerja	30%	19,42
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	10,79
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	12,50
	Jumlah	100%	66,22

Sumber: Surat Inspektorat Kota Batam Nomor 28/700.1.2/LHE/VIII/2023 tentang LHE AKIP Badan Kesbangpol Kota Batam Tahun 2022

C. KEUNGGULAN (*KEY SUCCES FACTORS*) STRATEGI DAN MANAJEMEN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

1. Keunggulan Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk melaksanakan pelayanan kinerja dalam periode tahun 2016 - 2021 di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Membangun semangat rasa persatuan dan kesatuan yang berwawasan kebangsaan kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi, dialog, seminar, *outbond*, pagelaran seni dan budaya serta ekonomi;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memelihara kerukunan antar umat beragama dan antar suku dalam kehidupan bermasyarakat melalui Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, khususnya kepada pelajar, mahasiswa sebagai pemilih pemula, kader partai politik, tokoh perempuan dan para pekerja di kawasan industri sebagai upaya peningkatan partisipasi politik pada pemilihan umum;

- d. Meningkatkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), TIM Pemantauan Orang Asing (POA) dan Peningkatan Kinerja Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi aktual, berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat; dan
- e. Meningkatkan peran Ormas dan LSM sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan ke-Ormasan.

Selanjutnya, beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam periode tahun 2021-2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kualitas kader pemuda yang dibina sebagai Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA).
- b. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya;
- c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum melalui pendidikan budaya dan etika politik;
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan hibah vertikal dan penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan data Organisasi Kemasyarakatan; dan
- f. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kota Batam.

Tujuan Jangka Menengah Daerah Kota Batam yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, ditempuh dengan mengoptimalkan keberadaan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) serta memanfaatkan keberadaan organisasi kemasyarakatan. Dalam upaya menciptakan solidaritas antara pemeluk agama dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran Jangka Menengah Daerah adalah Meningkatkan interaksi antar kelompok anggota masyarakat sehingga terciptanya

kerukunan dan ketenteraman hidup bermasyarakat. Untuk itu, beberapa **prioritas program pembangunan** yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yaitu dapat ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Prioritas Program Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

No.	Tujuan	Program
1	Kehidupan sehat dan sejahtera	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
2	Kesetaraan Gender	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3	Berkurangnya Kesenjangan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Etika Serta Budaya Politik
4	Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang tangguh	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya

Sumber: Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026

2. Manajemen Kinerja Pelayanan Publik

a. Perencanaan Kinerja

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang lengkap mulai dari Renstra, Renja, PK eselon II s.d. eselon IV, Renaksi atas PK dan Perencanaan anggaran berupa RKA yang kemudian ditetapkan menjadi DPA. Pedoman teknis penyusunan dokumen-dokumen perencanaan kinerja tersebut menggunakan peraturan dari kementerian terkait, Peraturan Walikota dan didukung dengan SOP kebijakan kepala OPD.
- Dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dinilai telah cukup memenuhi standar yang ditunjukkan dengan telah diformalkannya Renstra, Renja dan PK dengan kualitas rumusan

sasaran yang baik dan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART. Sehingga dapat dijadikan acuan setiap pegawai dalam merumuskan dan menetapkan rencana kerja individu.

- Dokumen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam upaya mewujudkan hasil yang berkesinambungan yang ditunjukkan dengan penetapan anggaran dan aktivitas yang dilaksanakan, yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai didukung dengan pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala sehingga dapat memberikan jaminan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, setiap pegawai menjadikan indikator dan target pada dokumen perencanaan kinerja OPD sebagai acuan indikator dan target dalam Rencana Kerja Tahunan individu.

b. Pengukuran Kinerja

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah melakukan pengukuran kinerja dan telah memiliki Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari pelaksana kegiatan sampai ke pimpinan selaku pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja dan dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- Meskipun data kinerja yang dikumpulkan dinilai telah relevan untuk mengukur capaian kinerja, tetapi mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja dinilai belum memadai karena hanya memanfaatkan teknologi informasi yang sederhana yaitu penggunaan rumus *excel* sederhana, *google sheet* dan melalui *whatsapp group*.
- Hasil pengukuran kinerja telah dimanfaatkan oleh pimpinan OPD dalam upaya penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran dengan memberikan rekomendasi kepada bidang atau pemegang kegiatan yang target kinerjanya belum tercapai. Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai salah satu syarat dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan walau

pun hanya sebagai penentu besaran penyerapan anggaran. Namun hasil pengukuran kinerja belum dijadikan sebagai dasar untuk pemberian *Sanksi* maupun *Reward* kepada pengawal.

c. Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah disusun dan diformalkan. Laporan kinerja juga telah dipublikasi di *website* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batan dan disampaikan tepat waktu melalui aplikasi *esr.menpan go.id* dan *e Gov* sesuai batas waktu yang telah ditentukan Kementerian PAN dan RB yaitu 31 Maret 2023. Melalui aplikasi tersebut dapat diyakini bahwa Laporan Kinerja telah disusun secara berkala setiap tahunnya.
- Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang diperjanjikan dengan menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Laporan Kinerja memaparkan kualitas atas keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan hambatannya serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depannya.
- Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai pedoman teknis penyusunan Laporan Kinerja hanya mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 53 tahun 2014.
- Informasi dalam Laporan Kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai yang ditunjukkan dengan diadakannya rapat-rapat secara berkala/triwulan terkait evaluasi pelaksanaan rencana aksi perjanjian kinerja.

d. Akuntabilitas Kinerja

- Pemerintah Kota Batam telah memiliki Peraturan Walikota Batam Nomor 51 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah yang diadaptasi dari Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam hanya sebatas pengukuran kinerja per triwulan.

- Hasil evaluasi program hanya sebatas upaya untuk memenuhi target kinerja yang belum tercapai tanpa adanya pengukuran/penilaian peningkatan implementasi SAKIP yang dilakukan secara mandiri yang dapat mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan peringkatan kinerja. Implementasi SAKIP hanya sebatas perbaikan dan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Internal Inspektorat.

D. KEBERLANGSUNGAN KEUNGGULAN STRATEGI DAN MANAJEMEN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

Gambaran hubungan yang berkesinambungan telah menunjukkan keselarasan pada setiap level jabatan, hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang/tugas, serta fungsi lain yang ditunjukkan dalam bentuk *crosscutting* dari penjabaran kinerjanya. Di sisi lain, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan kinerja pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2022 diharapkan dapat:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.
- b. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk meningkatkan kinerjanya.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka meningkatkan kerukunan dan ketenteraman hidup masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai instansi melakukan evaluasi dan monitoring untuk mencapai perbaikan kinerja atau mempertahankan penilaian kinerja yang telah baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan setelah adanya perencanaan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan demi tercapainya tujuan visi dan misi yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa capaian kinerja sudah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian masih terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan dengan optimal dan membutuhkan kelanjutan penyelesaian di tahun 2024-2026.

Dengan memperhatikan capaian dan analisis hasil evaluasi Renstra serta mempertimbangkan prioritas pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memetakan permasalahan utama bidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan tahun 2026, sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5
Pemetaan Permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
Tahun 2021-2026

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
		Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
	Kejadian konflik sosial dimasyarakat masih tinggi	Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
		Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.

		Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan
		Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
		Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.
	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
		Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
		Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
		Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.

Sumber: Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026

E. LESSON LEARNT HASIL STUDI LAPANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

1. PERAN KEPEMIMPINAN

Lahirnya inovasi dan keberlangsungannya sangat dipengaruhi dan dilatarbelakangi oleh adanya peran kepemimpinan yang dapat ditinjau dari ketiga aspek kepemimpinan sebagai berikut.

- Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme

Wujud transformasi digital merupakan bentuk inovasi yang lahir dari kepemimpinan Pancasila sebagai aktualisasi kemampuan awal bela negara melalui kesinambungan integritas. Penerapan sistem aplikasi SILELAPORMAS diharapkan memudahkan pelaporan ormas. Lebih jauh, penerapan sistem ini dapat menjamin ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Di sisi lain, dalam pemanfaatan sistem tersebut tentu harus mengedepankan nilai-nilai bela negara, seperti kesadaran berbangsa dan

bernegara, cinta tanah air, dan rela berkorban sehingga dapat mengutamakan kepentingan masyarakat umum dan pelayanan publik dengan tidak diskriminasi, serta lebih efektif.

- **Kepemimpinan Transformasional**

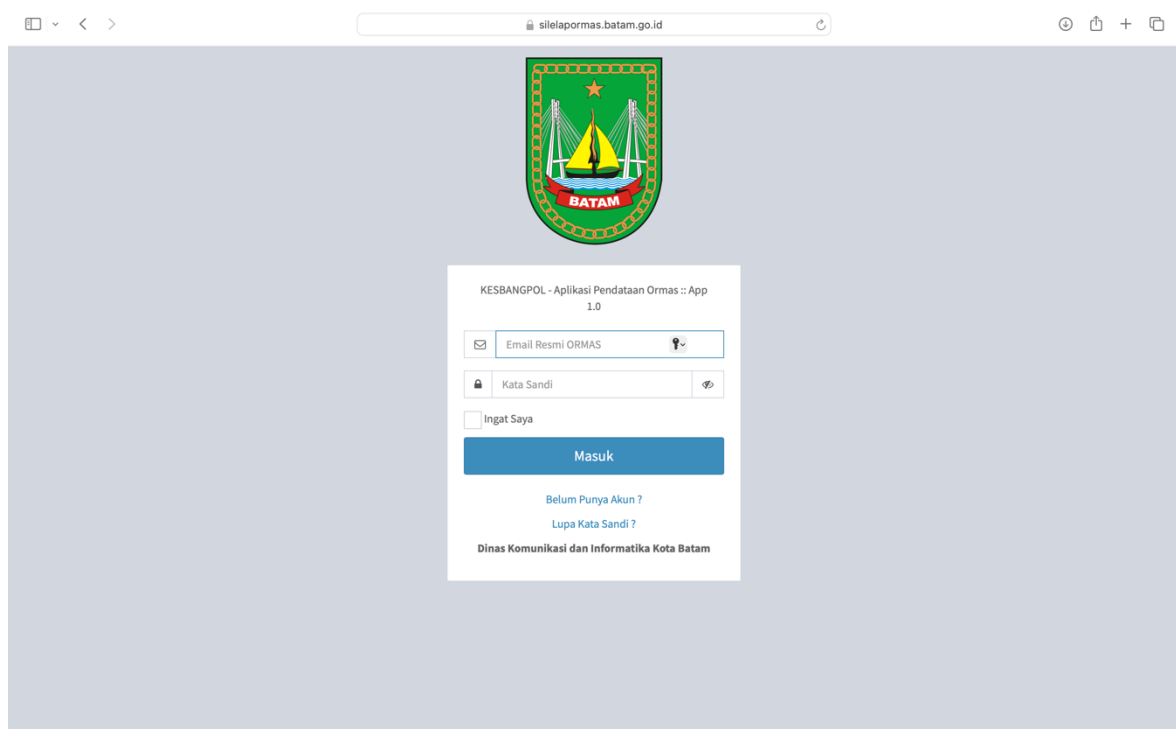
Peran kepemimpinan kinerja mempunyai kemampuan dalam mengelola perubahan sektor publik yang didukung adanya jejaring kerja dan komunikasi yang efektif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam rangka pencapaian organisasi berkinerja tinggi dengan mengedepankan kepemimpinan transformasi. Menurut Robbins dan Judge (2008) gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Apabila pemimpin mampu menerapkan gaya kepemimpinan transformasional maka kinerja karyawan akan semakin membaik.

Peran kepemimpinan transformasional sebagai agen perubahan (*agent of change*) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sangat penting dalam mentransformasikan organisasinya menuju kinerja yang optimal melalui perubahan-perubahan yang inovatif, yaitu dengan lahirnya Aplikasi SILELAPORMAS. Ini merupakan wujud kemampuan pemimpin dalam melakukan manajemen perubahan, yaitu suatu proses sistematis untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan menuju arah yang lebih baik, baik bagi perorangan (individu, pegawai) maupun organisasi. Dengan kata lain, kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam organisasi adalah kepemimpinan transformasional. Aplikasi SILELAPORMAS merupakan langkah inovasi sebagai suatu strategi peningkatan kinerja yang berfungsi dalam mengefektifkan proses pelaporan pendaftaran ormas karena proses ini dinilai sebagai suatu yang urgensi dan menjadi isu sentral dalam mencapai tujuan pembangunan yang dirumuskan.

2. INOVASI PELAYANAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai kinerja yang diharapkan dan sekaligus dapat mengatasi masalah pelayanan kinerja, terkhusus berkaitan dengan upaya peningkatan kerukunan dan ketenteraman hidup

masyarakat, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam membuat sebuah terobosan/inovasi yaitu menciptakan SILELAPORMAS (Sistem Pelaporan Organisasi Masyarakat) dengan alamat <https://silelapormas.batam.go.id>. SILELAPORMAS (Aplikasi Pelaporan Ormas) telah ditetapkan sebagai inovasi daerah Pemerintah Kota Batam melalui Keputusan Walikota Batam Nomor 454 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023. Aplikasi SILELAPORMAS dapat dikatakan sebagai aplikasi pelengkap dari aplikasi SIORMAS yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Perbedaannya adalah kalau aplikasi SIORMAS berfungsi untuk pendaftaran ormas, sedangkan SILELAPORMAS Kota Batam berfungsi untuk pelaporan keberadaan ormas yang terdapat di Kota Batam. Adapun tampilan halaman utama aplikasi SILELAPORMAS dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: Badan Kesbangpol Kota Batam, 2024 (<https://silelapormas.batam.go.id>)

Gambar 3
Halaman Utama Aplikasi SILELAPORMAS

Sebelum tahun 2017 setiap organisasi untuk daerah Kota Batam melakukan pendaftaran di Badan Kesbangpol Kota Batam, namun pada tahun 2017 dengan adanya Permendagri Nomor 57 tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan maka organisasi terbagi 2 (dua) yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum ada dua yaitu Perkumpulan dan Yayasan. Kedua organisasi ini untuk pendaftarannya bisa dilakukan pada Kemenkumham. Sementara organisasi yang tidak berbadan hukum disebut dengan Organisasi Kemasyarakatan yang pendaftarannya dilakukan di Kemendagri RI yang difasilitasi oleh Badan Kesbangpol.

Untuk Organisasi Kemasyarakatan mungkin tidak sulit untuk mengetahui keberadaannya karena pendaftarannya difasilitasi oleh Badan Kesbangpol, namun untuk Perkumpulan dan Yayasan apabila tidak dianjurkan untuk melapor maka Pemerintah akan sulit mengetahui keberadaannya sehingga sulit pula untuk mengawasinya. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam membuat Aplikasi SILELAPORMAS sebagai wadah Perkumpulan, Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan untuk melaporkan keberadaannya di Kota Batam. Secara definisi, Perkumpulan, Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak kebutuhan, kepentingan, kegiatan, yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Manfaat yang diperoleh dari hadirnya Aplikasi SILELAPORMAS di antaranya sebagai berikut.

- a. Manfaat bagi Masyarakat khususnya yang mempunyai organisasi dapat melaporkan keberadaannya dengan mudah tidak harus datang untuk mengantarkan dokumen yang apabila ada kekeliruan harus kembali lagi untuk memperbaiki dokumen dan mengantar kembali setelah diperbaiki.
- b. Manfaat bagi Pemerintah Kota Batam yaitu mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait organisasi dan lebih mudah dalam melaksanakan pengarsipan dokumen organisasi.

Aplikasi SILELAPORMAS saat ini telah dilakukan sosialisasi hanya kepada organisasi yang ingin melaporkan keberadaan yaitu dengan cara menjelaskan

prosedur/ tata caranya serta memberikan buku panduan. Tentunya ormas yang ada di Kota Batam semakin berkembang karena kondisi masyarakat Kota Batam yang heterogen mencakup banyak suku dari seluruh Indonesia. Bahkan jumlah paguyuban yang ada di Kota Batam sudah mencapai 27 provinsi. Oleh karena itu, penting aplikasi SILELAPORMAS dalam merespon segala bentuk perubahan dan dinamika yang berkembang di masyarakat Kota Batam, yang pada akhirnya dapat menciptakan kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

3. KOMPETENSI DAN PEMBERDAYAAN SDM

Dalam pengelolaan aplikasi SILELAPORMAS Super Admin yaitu untuk menyetujui dan menghapus akun, ada Admin 1 (staf) dan Admin 2 (Kabid) untuk memeriksa kesesuaian dokumen pelaporan organisasi, dan Admin 3 (Kaban) untuk menyetujui apabila semua dokumen telah lengkap dan sesuai. Sementara itu, untuk pemberdayaan SDM dalam aplikasi ini dilakukan koordinasi dengan tenaga ahli Diskominfo yang telah membantu dan yang paling memahami terkait Aplikasi SILELAPORMAS sehingga diharapkan Sumberdaya Manusia di Badan Kesbangpol Kota Batam memiliki kemampuan untuk menguasai memanfaatkan aplikasi sehingga masyarakat bisa dilayani dengan baik.

Tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sarana, prasarana dan peralatan kerja. Oleh karena itu skala prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam rangka pengembangan organisasi adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kerja untuk memperoleh dukungan sumber daya yang berkualitas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam didukung oleh personil sebanyak 37 (tiga puluh lima) orang. Jumlah tersebut terdiri dari 32 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 3 orang tenaga kontrak. Adapun jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menurut golongan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
Menurut Golongan

No.	Uraian	Menurut Golongan			Jumlah
		II	III	IV	
1	Struktural	-	3	4	7
2	Fungsional	-	7	2	9
3	Staf Sekretariat	1	5	-	6
4	Staf Bidang	3	12	-	15
Jumlah		4	27	6	37

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2023

4. PEMBANGUNAN JEJARING KERJA DAN KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN

Jejaring kerja adalah suatu set hubungan yang kuat maupun lemah antar para pihak berisi berbagai hubungan (baik hubungan antar personal maupun hubungan antar organisasi) yang ditandai dengan adanya hubungan dengan ikatan. Manfaat jejaring kerja karena bertambahnya kompleksitas karena:

- a) Meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat.
- b) Ekspektasi masyarakat yang makin tinggi terhadap pemenuhan pelayanan publik.
- c) Persaingan global yang semakin kompetitif.

Penerapan aplikasi SILELAPORMAS melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) yang memiliki kepentingan dan berpengaruh terhadap jalannya aplikasi. *Stakeholder* ini merupakan jejaring kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang secara bersama-sama memiliki peran terhadap implementasi serta pemanfaatan aplikasi SILELAPORMAS. Pentingnya kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga selaku jejaring kerja bertujuan untuk keberhasilan dan efektivitas penerapan aplikasi SILELAPORMAS. Adapun berbagai pihak tersebut di antaranya adalah Kepala Daerah, unsur Forkopimda yaitu Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, Komando Distrik Militer, Dinas Kominfo Kota Batam, dan OPD lainnya.

Pada langkah persiapan implementasi SILELAPORMAS telah menerapkan kolaboratif pentahelix yaitu utamanya melibatkan peran serta Pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media. Sementara peran serta pelaku usaha relatif kurang signifikan. Badan Kesbangpol Kota Batam juga telah melakukan dialog ormas secara rutin sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun guna merespon kebutuhan ormas. Di samping itu juga menyosialisasikan kepada ormas untuk melakukan pelaporan keberadaan ormas utamanya melalui aplikasi yang sudah ada yaitu SILELAPORMAS. Media massa juga telah berperan dalam memberikan informasi terkait pentingnya pelaporan keberadaan ormas.

5. PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA

Pemerintah Kota Batam melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara transparan dan akuntabel telah melaksanakan manajemen kinerja dalam proses perencanaan hingga pelaporan kinerja. Manajemen kinerja merupakan suatu proses atau hal-hal yang dilakukan untuk tercapainya kinerja organisasi yang berkaitan dengan perencanaan, pengukuran, penilaian kinerja, dan pelaporan kinerja. Secara rinci, terkait manajemen kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Perencanaan Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang lengkap mulai dari Renstra, Renja, PK eselon II s.d. eselon IV, Renaksi atas PK dan Perencanaan anggaran berupa RKA yang kemudian ditetapkan menjadi DPA. Dokumen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam upaya mewujudkan hasil yang berkesinambungan yang ditunjukkan dengan penetapan anggaran dan aktivitas yang dilaksanakan, yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai didukung dengan pemantauan rencana aksi kinerja secara berkala sehingga dapat memberikan jaminan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, setiap pegawai menjadikan indikator dan target pada dokumen perencanaan kinerja OPD sebagai acuan indikator dan target dalam Rencana Kerja Tahunan individu.

b. Pengukuran Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah melakukan pengukuran kinerja dan telah memiliki Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari pelaksana kegiatan sampai ke pimpinan selaku pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja dan dilakukan secara berkala setiap triwulan.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah disusun dan diformalkan. Laporan kinerja juga telah dipublikasi di *website* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batan dan disampaikan tepat waktu melalui aplikasi *esr.menpan go.id* dan *e Gov* sesuai batas waktu yang telah ditentukan Kementerian PAN dan RB yaitu 31 Maret 2023. Melalui aplikasi tersebut dapat diyakini bahwa Laporan Kinerja telah disusun secara berkala setiap tahunnya. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang diperjanjikan dengan menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Laporan Kinerja memaparkan kualitas atas keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja dan hambatannya serta upaya perbaikan dan penyempurnaan ke depannya.

d. Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kota Batam telah memiliki Peraturan Walikota Batam Nomor 51 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah yang diadaptasi dari Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam hanya sebatas pengukuran kinerja per triwulan.

6. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam pengelolaan risiko, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memiliki tanggung jawab dalam Pengelolaan Risiko Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang bertujuan mengendalikan risiko-

risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam juga bertanggung jawab atas Pengelolaan Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yang bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD, dan Rencana Kerja OPD (Renja dan/atau RKPD).

Pada hakikatnya, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan memerlukan suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai model penerapan Manajemen Risiko bagi setiap OPD. Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian, yang bertujuan meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja atau melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi; serta meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Berkaitan dengan hal itu, maka terdapat beberapa identifikasi risiko strategis yang mungkin dapat terjadi sebagaimana dapat ditunjukkan pada Tabel 7. Berdasarkan kemungkinan risiko tersebut maka dibutuhkan strategi dalam rangka memitigasi terjadinya risiko, yaitu di antaranya menjalankan pemantauan dan evaluasi kegiatan secara konsisten dengan berpedoman pada Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Berkaitan dengan aplikasi SILELAPORMAS, diidentifikasi secara risiko operasional maka terdapat kemungkinan risiko yang terjadi yaitu gangguan jaringan internet dan gangguan server. Mengingat wilayah Kota Batam terdapat 3 (tiga) kecamatan *hinterland* serta berbentuk gugus kepulauan maka dapat menyebabkan masalah jaringan. Untuk itu, mitigasi risiko yang dilakukan adalah memastikan koneksi jaringan dapat stabil.

Tabel 7
 Register Resiko Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun Anggaran 2024

No	SASARAN STRATEGI OPD			Resiko		Penyebab Resiko	Controlable/ Uncontrolable	Dampak	Level Resiko			Pengendalian yang ada		Rencana Pengendalian Lanjutan	Target Waktu	Risk Owner													
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	No	Pernyataan Resiko				Skor Dampak	Skor kemungkinan	Total Skor	Kategori	Uraian Pengendalian				Tingkat Efektivitas												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10x11	13	14	15	16	17	18												
1	Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Keskretarian	1	Adanya rasionalisasi anggaran	Defisit anggaran akibat Pendapatan Daerah tidak sesuai target	Uncontrolable	Pelaksanaan Kegiatan tertunda/ pengurangan volume kegiatan	1	2	2	Sangat Rendah	Koordinasi dengan bagian Keuangan	Cukup Efektif	Merevisi kembali Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	12 bulan	Bidang Sekretariat												
		2. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila	Persentase masyarakat yang terbina dalam Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.	1	Adanya rasionalisasi anggaran	Defisit anggaran akibat Pendapatan Daerah tidak sesuai target	Controlable	Pelaksanaan Kegiatan tertunda/ pergeseran waktu	1	2	2	Sangat Rendah	Koordinasi dengan bagian Keuangan	Cukup efektif	Merevisi kembali Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	8 Bulan	Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan karakter kebangsaan												
		3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik	1. Angka partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres 2. Angka partisipasi dalam pemilu Pilkada	1	Adanya rasionalisasi anggaran	Defisit anggaran akibat Pendapatan Daerah tidak sesuai target	Controlable	1. Potensi terkendalanya pelaksanaan kegiatan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat. 2. Pelaksanaan Kegiatan tertunda/ pergeseran waktu dan tidak optimalnya target sasaran	1	2	2	Sangat Rendah	Koordinasi ke TAPD dan bagian Perencanaan Kesbangpol	Efektif	Merevisi kembali Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	8 bulan	Bidang Politik												
																		2. Penurunan partisipasi dikarenakan kurangnya pemahaman pendidikan politik	Controlable	Rendahnya partisipasi pemilu	2	3	6	Sedang	Melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan politik	Efektif	Meningkatkan kuantitas sosialisasi pendidikan politik	12 bulan	
																		3. Persentase masyarakat dan Partai Politik yang dibina	2	Pemahaman Legalitas Dokumen dan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Parpol	Controlable	Penyampaian Laporan keuangan bantuan Parpol belum sesuai ketentuan peraturan	1	2	2	Sangat Rendah	Koordinasi dengan Parpol dan BPKAD	Efektif	Melakukan Bimbingan Teknis kepada Partai Politik
		4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Organisasi Masyarakat yang dibina	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat	1	Pemahaman Legalitas Dokumen dan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Omnas	Kurangny pemahaman laporan pertanggungjawaban dan	Uncontrolable	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan omnas belum sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan.	2	3	6	Sedang	Koordinasi dengan APIP dan Omnas terkait	Efektif	Koordinasi dengan APIP dan Omnas terkait	12 bulan	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Omnas												
																		2	Adanya rasionalisasi anggaran	Defisit anggaran akibat Pendapatan Daerah tidak sesuai target	Controlable	1. Merasionalisasi dana hibah omnas. 2. Pelaksanaan Kegiatan tertunda/ pergeseran waktu dan tidak optimalnya target sasaran	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan bagian Keuangan dan TAPD	Cukup efektif	Merevisi kembali Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
		5. Meningkatnya Pemberdayaan, Partisipasi, gotong royong kerukunan masyarakat dan toleransi masyarakat	Persentase Penanganan Konsolidasi Kerukunan antar Agama	1	Pemahaman Legalitas Dokumen dan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Organisasi	Kurangny pemahaman laporan pertanggungjawaban dan	Uncontrolable	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan omnas belum sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan.	3	3	9	Sedang	Rasionalisasi Kegiatan	Efektif	Koordinasi dengan APIP dan Omnas terkait	12 bulan													
																		2	Adanya rasionalisasi anggaran	Defisit anggaran akibat Pendapatan Daerah tidak sesuai target	Controlable	1. Merasionalisasi dana hibah omnas keagamaan. 2. Potensi tertundanya pelaksanaan pemberian Hibah Omnas keagamaan. 3. Tertundanya pelaksanaan kegiatan dan tidak optimalnya	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan Perencana dan TAPD	Cukup efektif	Merevisi kembali Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)
		6. Optimalnya penanganan potensi konflik SARA	1. Persentase Implementasi Kebijakan antar Lembaga dalam rangka peningkatan fasilitas kewaspadaan nasional 2. Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini 3. Persentase potensi konflik yang terselesaikan	1	Adanya rasionalisasi anggaran	Defisit anggaran akibat Pendapatan Daerah tidak sesuai target	Controlable	1. Merasionalisasi kegiatan dan belanja hibah kepada instansi vertikal. 2. Pelaksanaan kegiatan tidak bisa berjalan optimal	3	3	9	Sedang	Koordinasi dengan Perencana dan TAPD	Efektif	Merevisi kembali Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	12 Bulan	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik												
																		2	Minimnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Deteksi Dini dan Cegah Dini oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemahaman Deteksi dini dan Cegah Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG)	Uncontrolable	Peserta tidak memahami dan mengerti tentang materi kegiatan/ UUI Perundangn yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan Peraturan Organisasi Kemasyarakatan	2	2	4	Rendah	Penguatan Koordinasi, Sinergi dan Komunikasi	Efektif	Meningkatkan kuantitas sosialisasi Deteksi dini dan Cegah Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG)	12 Bulan
																		3	Minimnya Pemahaman Tim Terpadu PKS terhadap Potensi Konflik	Uncontrolable	Pelaksanaan Kegiatan tidak Optimal	2	2	4	Rendah	Penguatan Koordinasi dan Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Efektif	Meningkatkan Keterpaduan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan

7. PLANNING and BUDGETING

Pada proses perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah melaksanakannya dengan prinsip penyusunan anggaran terpadu, yaitu proses perencanaan sampai dengan penganggaran dilakukan secara terintegrasi melalui sistem elektronik yaitu SIPD, mulai dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja berdasarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam juga telah mengedepankan prinsip penganggaran berbasis kinerja, yaitu mengalokasikan anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*). Artinya, penyusunan anggaran yang dilakukan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Berikut program pada Badan Kesbangpol Kota Batam:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Adapun rencana program kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026 dapat dilihat secara rinci pada Tabel 8.

Tabel 8
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD (2026)	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mewujudkan Pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penurunan Konflik	11,10%		12,50%		14,30%		16,70%		20%		25%		25%	
			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Sekretariat	95		95		95		95		95		95		95	
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			14.058.722.801		17.760.417.566		40.616.214.780		56.989.547.421		28.625.169.793		29.632.896.980		187.686.969.341
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	92%	5.816.949.257	100%	8.317.983.655	100%	8.317.983.655	100%	8.317.983.655	100%	9.239.223.878	100%	9.593.086.153	100%	49.603.210.253
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	95%	5.371.092.965	100%	7.474.530.720	100%	7.474.530.720	100%	7.474.530.720	100%	8.302.356.145	100%	8.542.543.086	100%	44.639.584.356
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	0%	0	0	0	0	0	100%	66.170.000	100%	66.170.000	100%	66.170.000	100%	198.510.000
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	54%	180.288.209	100%	392.839.735	100%	392.839.735	100%	326.669.735	100%	370.177.847	100%	465.383.996	100%	2.128.199.257
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	69.020.000	100%	151.222.000	100%	151.222.000	100%	151.222.000	100%	167.970.264	100%	174.168.367	100%	864.824.631
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	129.777.283	100%	184.731.200	100%	184.731.200	100%	184.731.200	100%	205.190.703	100%	212.762.240	100%	1.101.923.826
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Layak Fungsi	100%	66.770.800	100%	114.660.000	100%	114.660.000	100%	114.660.000	100%	127.358.919	100%	132.058.464	100%	670.168.183
	2. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila		Persentase masyarakat yang terbina dalam Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.	95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%	
	2. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila		Persentase masyarakat yang terbina dalam Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.	95%		95%		96%		96%		96%		97%		97%	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "yang Dilaksanakan"	100%	119.950.000	100%	160.016.000	100%	165.520.550	100%	171.413.082	100%	177.738.225	100%	184.545.599	100%	979.183.456
			2. Cakupan Peserta Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Jumlah Total Calon Peserta yang Seharusnya	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Ditindaklanjuti	100%	119.950.000	100%	160.016.000	100%	165.520.550	100%	171.413.082	100%	177.738.225	100%	184.545.599	100%	979.183.456
			2. Persentase Peserta yang Bersertifikat Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik		1. Angka partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres							77%							
			2. Angka partisipasi dalam pemilu Pilkada							77%							
			3. Persentase masyarakat dan Partai Politik yang dibina					95%		96%		97%		97%		98%	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan	100%	1.879.457.544	100%	2.177.920.861	100%	22.760.768.115	100%	38.727.074.673	100%	8.875.959.053	100%	8.893.421.261	100%	83.314.601.507
			2. Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	1.853.612.544	100%	1.847.430.611	100%	22.418.909.000	100%	38.373.045.374	100%	8.508.866.072	100%	8.512.286.619	100%	81.514.150.220
			2. Persentase Pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			3. Persentase Peserta/Unit yang dimonev dan Menindaklanjuti Hasilnya	75%	25.845.000	75%	330.490.250	80%	341.859.115	85%	354.029.299	85%	367.092.981		381.134.642		1.800.451.287

8. PEMANFAATAN TEKNOLOGI

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dapat dimanfaatkan dalam memudahkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sehingga menjadi lebih efektif, efisien, praktis, dan berkualitas. Hal ini memberikan kemudahan terhadap akses pelaporan ormas secara digital untuk menghasilkan keakuratan data sebagai dasar kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya dan dalam rangka beradaptasi terhadap kemajuan teknologi maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam merumuskan konsep inovasi digital dengan menciptakan aplikasi berbasis *website* yaitu SILELAPORMAS Kota Batam. Sampai dengan tahun 2023 jumlah ormas yang terdaftar adalah sebanyak 376 ormas yang mencakup organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi kedaerahan (paguyuban).

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Kota Batam. 2021. *Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*. Batam.
- Pemerintah Kota Batam. 2021. *Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan*. Batam.
- Pemerintah Kota Batam. 2022. *Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Peraturan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026*. Batam.
- Pemerintah Kota Batam. 2023. *Peraturan Walikota Batam Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*. Batam.
- Pemerintah Kota Batam. 2023. *Keputusan Walikota Batam Nomor 454 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023*. Batam.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam*. Jakarta.

LAMPIRAN



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik menerangkan bahwa penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menerangkan bahwa Nomenklatur Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota menerangkan bahwa Dinas Damkar dan Penyelamatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk sebagai Dinas yang mandiri dan tidak digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- g. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 96).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Maret 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI
KEPULAUAN RIAU (1,7/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

See Also, Link:

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah

https://drive.google.com/file/d/18Yf79M-IQYZQyHBWuiXE0pnp6IU6o8at/view?usp=share_link



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, BADAN DAERAH DAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kota Batam yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

- d. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 19 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 806); dan
- e. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 serta Lampiran yang mengatur Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Peraturan Nomor 37 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 824).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur Jabatan Struktural Eselon III dan IV yang Pejabat Fungsional penyetaraannya/disetarakan sebagai pengganti Jabatan Struktural Eselon III dan IV yang disederhanakan berdasarkan kebijakan reformasi birokrasi pemerintah, belum diangkat/dilantik oleh Wali Kota.

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 863

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
u.b
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

See Also, Link:

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan
Kecamatan

[https://drive.google.com/file/d/1bK0nzAtIrrteUgh4MyN5YTqleQt9jvY0/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1bK0nzAtIrrteUgh4MyN5YTqleQt9jvY0/view?usp=drive_link)



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN SISTEM KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan disebutkan Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi pada Instansi Pemerintah setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Batam tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Pebruari 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1149

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001

See Also, Link:

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2023
Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja
Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

[https://drive.google.com/file/d/18UF6s_I68Dot7KVzNwUNKJ5H_FFpI6e9/view?usp=share link](https://drive.google.com/file/d/18UF6s_I68Dot7KVzNwUNKJ5H_FFpI6e9/view?usp=share_link)



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 454 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2023

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam diperlukan sebuah upaya untuk memacu setiap perangkat daerah menghasilkan inovasi setiap tahunnya;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah, perlu diatur regulasi Nama-nama Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam Nomor 393/000.9.2/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, perlu menetapkan Nama-nama Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023 dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang . . .

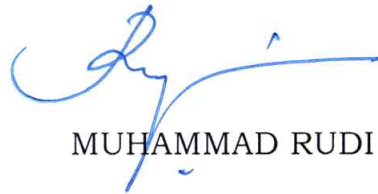
11. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 176 Tahun 2022 tentang Makmal Inovasi Daerah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1044);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : NAMA-NAMA INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2023.
- KESATU : Nama-nama Inovasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Desember 2022

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

See Also, Link:

Keputusan Walikota Batam Nomor 454 Tahun 2023
Tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

[https://drive.google.com/file/d/1GYZOr88oAQbz_QdXNbR4f0SGHgE-2nXX/view?usp=share link](https://drive.google.com/file/d/1GYZOr88oAQbz_QdXNbR4f0SGHgE-2nXX/view?usp=share_link)



PEMERINTAH KOTA BATAM

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021-2026**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR TABEL.....	X
KATA PENGANTAR.....	XXII
DAFTAR SINGKATAN.....	XXIV
BAB I PENDAHULUAN	I-2
1.1 Latar Belakang.....	I-2
1.1.1 Latar Belakang Penyusunan RPJMD 2021-2026	I-2
1.1.2 Dampak Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19) Terhadap Penyusunan RPJMD Kota Batam 2021-2026	I-6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-9
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-16
1.4 Maksud dan Tujuan RPJMD.....	I-22
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-22
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-2
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-2
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-2
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-15
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II-20
2.1.4 Demografi.....	II-24
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-32
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Sosial	II-32
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-48
2.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga.....	II-70
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-72
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Layanan Wajib.....	II-72

2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-238
2.3.3	Fokus Fungsi Penunjang	II-257
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-269
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-269
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-271
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-276
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-277
BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH		III-2
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-3
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III-5
3.1.2	Neraca Daerah	III-25
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-34
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-34
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III-37
3.3	Kerangka Pendanaan	III-41
3.3.1	Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.....	III-41
3.3.2	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-54
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH		IV-2
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-2
4.2	Isu Strategis.....	IV-34
4.2.1	Adaptasi Era Normal Baru Pasca Wabah Covid-19	IV-42
4.2.2	Mengembangkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	IV-46
4.2.3	Reformasi Birokrasi	IV-48
4.2.4	Mewujudkan Batam sebagai Bandar Madani Berstandar Internasional.....	IV-50
4.2.5	Menciptakan Batam sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....	IV-51
4.2.6	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.....	IV-52

4.2.7	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan	IV-54
4.2.8	Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD.....	IV-55
4.2.9	Pembangunan Berbasis Gender (Perempuan, Anak, Disabilitas dan Lansia).....	IV-57
4.2.10	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	IV-59
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....		V-2
5.1	Visi	V-2
5.2	Misi	V-3
5.3	Tujuan dan Sasaran	V-7
5.4	Hubungan Antara Isu Strategis dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026	V-29
5.5	Keselarasannya Visi dan Misi Pembangunan Kota Batam 2021-2026 dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kota Batam 2005-2025.....	V-31
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....		VI-2
6.1	Strategi Pembangunan Daerah	VI-2
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-24
6.3	Program Pembangunan Daerah.....	VI-33
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		VII-2
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-2
7.2	Program Perangkat Daerah	VII-5
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VIII-2
BAB IX PENUTUP.....		IX-2
9.1	Pedoman Transisi	IX-2
9.2	Kaidah Pelaksanaan.....	IX-3

See Also, Link:

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam
Tahun 2021 - 2026

[https://drive.google.com/file/d/1S--434PLINQg_wBga-TsVyac8RDfSakk/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1S--434PLINQg_wBga-TsVyac8RDfSakk/view?usp=drive_link)

RENSTRA PERUBAHAN 2021-2026



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATAM**

Kantor Bersama, Jalan Raja Isa No. 17 Batam Centre

Telp./Fax. : (0778) 470620 Email : kesbangpolbatam@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH...	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	36
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.	48
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	49
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	49
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	51
3.3 Telaahan Renstra K.L dan Renstra Provinsi SKPD.....	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	60
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	70
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	79
5.1 Stategi dan Kebijakan	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	93
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	104
BAB VIII PENUTUP	120

See Also, Link:

Renstra Perubahan 2021 - 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

[https://drive.google.com/file/d/1D0rFoiEaJEwn7PszMY5OjTNyM96ycY-T/view?usp=share link](https://drive.google.com/file/d/1D0rFoiEaJEwn7PszMY5OjTNyM96ycY-T/view?usp=share_link)



**PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raja Isa Nomor 17 Kec. Batam Kota Gedung Dinas Bersama Lantai 3

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP)
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : 28/700.1.2/LHE/VIII/2023
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2023**

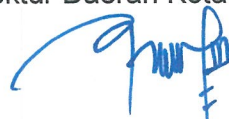
Dokumen ini merupakan dokumen daerah bersifat rahasia dan dilarang dipublikasikan tanpa seizin Inspektorat Daerah Kota Batam

implementasi SAKIP di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat meningkat.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berencana Kota Batam.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kota Batam,



Hendriana Gustini, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680824 199008 2 001

3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	CC	4.50	
Kriteria:					
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				Dokumen Belum dilampirkan : - Belum melampirkan Undangan rapat, Notulen rapat, absensi rapat pembahasan pengukuran kinerja berkala tahun 2022; - Perubahan Renaksi 2022(jika ada);
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja				
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		12.50	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	B	3.50	
Kriteria:					
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				Kualitas atas Dokumen dilampirkan : - Pada SOP evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menuat langkah yang menunjukan peran tim evaluasi sesuai SK evaluasi internal yang sudah dibentuk pimpinan.
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	BB	6.00	
Kriteria:					
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				Dokumen Belum dilampirkan : - Surat tugas/ Nota Dinas/ Sertifikat pegawai di dalam tim SK Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang sudah mengikuti bimtek/diklat/seminar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	D	0.00	
Kriteria:					
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah				Dokumen Belum dilampirkan : - LHE (Laporan Hasil Evaluasi) SAKIP Inspektorat 2021.
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.				
3	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				
TOTAL NILAI (PREDIKAT)		100	B	66.22	BAIK

Kesimpulan Hasil Evaluasi:

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja

Batam, 31 Agustus 2023
Tim Evaluator,

Dalnis/Supervisor

: Yayak Dahlia, S.H., M.H.
19750215 200502 2 005

Ketua Tim

: Kembara Patrianusa, S.E.
19770514 200212 1 008

Evaluator OPD

: Masdi Tapri, S.E.
19661231 200801 1 032

See Also, Link:

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
Tahun Anggaran 2022

https://drive.google.com/file/d/1peA74zxhizmJ7D2WzMqsSAEwEUymEmj6/view?usp=drive_link



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BATAM

Kantor Bersama Jalan Raja Isa NO.17 Batam Center
Email : kesbangpolbatam@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Struktur Organisasi	3
I.5 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	14
I.6 Aspek Strategis Organisasi	15
I.7 Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi ..	15
I.8 Sumber Daya Manusia	16
I.9 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	18
II.1 Rencana Stategis	18
1) Visi	18
2) Misi	19
3) Tujuan	19
4) Sasaran	20
5) Strategi	21
6) Kebijakan	23
7) Program dan Kegiatan	23
8) Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2023.....	25
II.2 Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
III.1 Indikator Kinerja Utama.....	35
III.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
III.3 Analisis Capaian Kinerja.....	38
III.4 Pencapaian Realisasi Anggaran.....	49
III.5 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
III.6 Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Publik oleh OPD.....	54
BAB IV PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I	16
Tabel II.....	16
Tabel III	21
Tabel IV.....	24
Tabel V	27
Tabel VI.....	32
Tabel VII	35
Tabel VIII.....	37
Tabel IX.....	37
Tabel X	39
Tabel XI	40
Tabel XII.....	44
Tabel XIII	49
Tabel XIV.....	54
Tabel XV	57

See Also, Link:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun Anggaran 2023

https://drive.google.com/file/d/1kR-AzkOJn8EsgYLGDYLVHCn-EvLA99Xm/view?usp=share_link



Panduan Penggunaan Aplikasi SILELAPORMAS

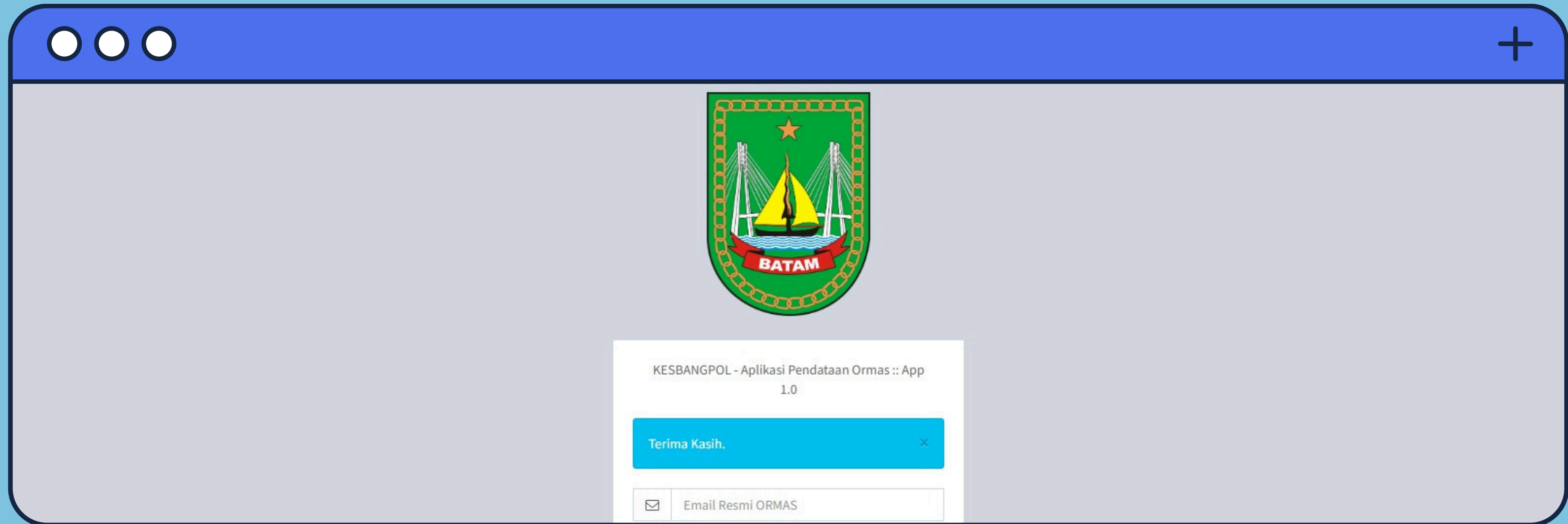
Aplikasi SILELAPORMAS adalah aplikasi terintegritas yang berisikan pendaftaran dan pengelolaan data Ormas berbasis Web dan dapat diakses menggunakan Komputer/Laptop, Gadget (Hp, Tablet) via Browser





Pemerintah Kota Batam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

<https://silelapormas.batam.go.id/web/>



User : Organisasi Masyarakat



bakesbangpolbatam.go.id



Perkenalan



KESBANGPOL - Aplikasi Pendataan Ormas :: App
1.0

Terima Kasih. ✕

👁️

Ingat Saya

Masuk

[Belum Punya Akun ?](#)
[Lupa Kata Sandi ?](#)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam



Proses untuk masuk ke dalam sebuah layanan online yang berisi nama dan password.



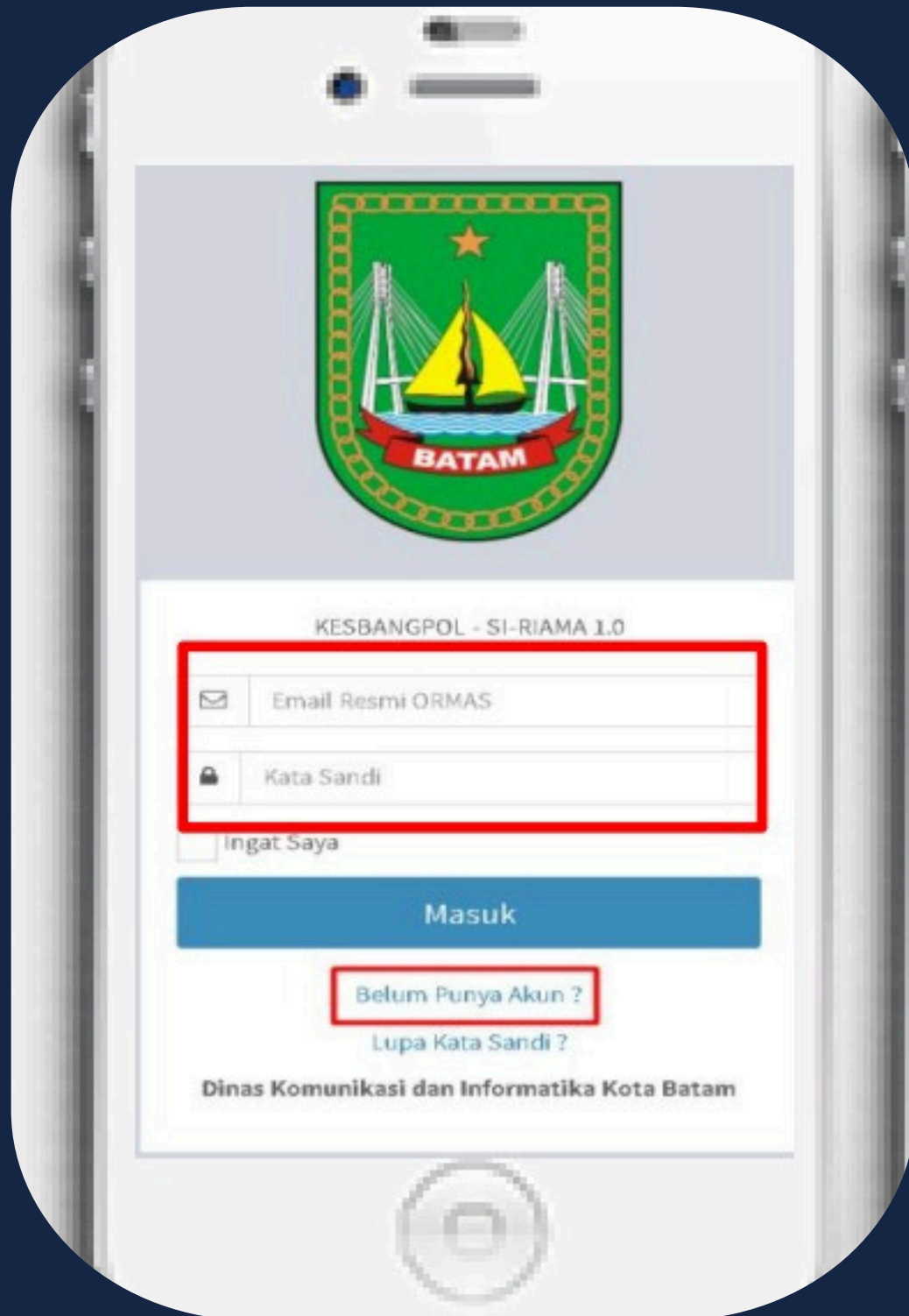
sistem registrasi merupakan suatu jaringan kerja atau prosedur yang saling berinteraksi untuk dapat melakukan pencatatan atau pendaftaran.

<https://silelapormas.batam.go.id/web/>

Daftar Isi

- Login Akun
- Registrasi Akun
- Permohonan Pengajuan
- Permohonan Selesai





LOGIN AKUN

1. Isi field email dan Password

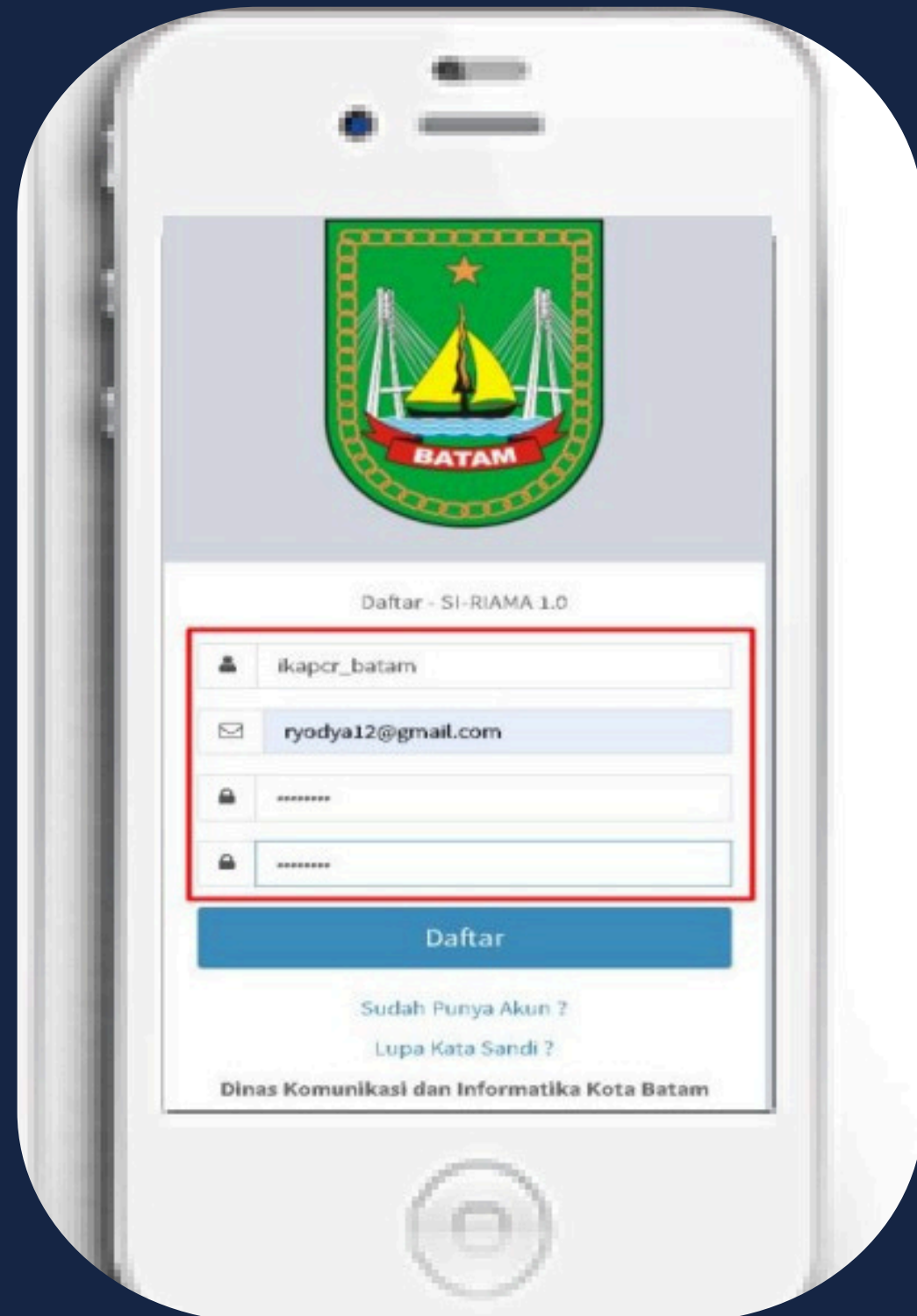
2. Klik Masuk untuk dapat Login

3. Klik Lupa Kata Sandi jika pengguna lupa password

4. Tautan lupa password akan dikirimkan melalui email yg telah diisi

Selamat Datang, ikapcr_batam.





REGISTRASI AKUN

1. Klik belum punya akun untuk registrasi

2. Isi Field nama ormas, email, password dan konfirmasi password.































3. Klik Daftar.

4. Selanjutnya akun yg telah didaftarkan akan diaktifkan oleh admin.

Pendaftaran Telah Berhasil !
Untuk Mengaktifkan Akun, Silahkan Hubungi Administrator !





Email Resmi ORMAS	Aktif	Grup	Aksi
apriliamelisa08@gmail.com	Ya	admin	  
bhinnekakaryabersama08@gmail.com	Ya	pemohon	  
info.bkagbatam@gmail.com	Ya	pemohon	  
demastaiibnusina@gmail.com	Ya	pemohon	  
dian.hari.susanto@batam.go.id	Ya	verifikator	  
difa.ananda.p@dev.batam.go.id	Ya	root	  
soksibatam@gmail.com	Ya	pemohon	  
fahrani.iskandar@batam.go.id	Ya	admin	  
satriatanjung1969@gmail.com	Ya	pemohon	  
mabesgardakamtibmas@gmail.com	Ya	pemohon	  

Permohonan Pengajuan

Pilih Tambah Permohonan, Kemudian isi inputan yang tersedia, dan upload file sesuai dengan persyaratan : dengan extension PDF maksimal 10 mb. Inputan dengan tanda * warna merah "WAJIB DIISI". Kemudian Klik Simpan dan perubahan akan masuk ke Draf Permohonan

[Link Pendaftaran Ormas](#)



Permohonan Pengajuan

Bentuk upload dokumen yang harus dilengkapi oleh ormas terkait.

Sifat Permohonan (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Nama ORMAS
ikapor_batam

No. SK KEMENKUMHAM (*)
196335942213

No. Akta Notaris (*)
5022

Alamat Sekretariat (*)
legenda buli blok b20

Jenis ORMAS (*)
KEMENKUMHAM

Ciri Khusus ORMAS (*)
Kewirausahaan

Penanggung Jawab

Nama Penanggung Jawab (*)
andi

No. Telepon Penanggung Jawab (*)
089222235455

Jabatan pada ORMAS (*)
berdharma

Penasehat (*)
-

Ketua Umum (*)
Indy

Sekretaris (*)
madya

Bendahara (*)
andi

Pembina (*)
-

Upload File Pendukung

Akta Pendirian (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Domisili ORMAS (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Surat Rekomendasi dari Kementerian atau dari Instansi Pemerintah (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Sasaran Kepengurusan (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Foto Pengurus (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

KTP Pengurus Inti (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Surat Sewa Sekretariat (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

KEMENKUMHAM (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Surat Rekomendasi Kementerian Agama (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Surat Pernyataan Persetujuan dari Pejabat atau Tokoh Masyarakat (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Biodata Pengurus Inti (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

NPWP Nama ORMAS (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Program Kerja (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Surat Pernyataan (PDF/MAX:10MB) (*)
Choose File CamScanner...3 09.39.pdf

Contoh Surat Pernyataan
Unduh Contoh Surat Pernyataan





Permohonan Pengajuan

Ubah Permohonan dengan memilih aksi → Ubah dan kemudian Ajukan permohonan agar permohonan dapat langsung di submit dan diproses oleh admin verifikator.

Akta Pendirian (PDF|MAX:10MB)
Choose File No file chosen

Domisili ORMAS (PDF|MAX:10MB)
Choose File No file chosen

Surat Rekomendasi dari Kementrian atau dari Instansi
Choose File No file chosen

Susunan Kepengurusan (PDF|MAX:10MB)
Choose File No file chosen

Foto Pengurus (PDF|MAX:10MB)
Choose File No file chosen

KTP Pengurus Inti (PDF|MAX:10MB)
Choose File No file chosen

Surat Sewa Sekretariat (PDF|MAX:10MB) ?
Choose File No file chosen

Simpan **Ajukan** Kembali





Permohonan Pengajuan

No ORMAS	Email Resmi ORMAS	Jenis ORMAS	Alamat Sekretariat	No. Telepon Penanggung Jawab	Status
cr_batam	ryodya12@gmail.com	Organisasi Masyarakat (ORMAS)	legenda bali blok b20	085622235456	Status Terverifikasi, Silahkan Ambil Sertifikat

Permohonan yang telah selesai diproses akan masuk ke halaman pemohon.


Detail Permohonan

Pesawat Verifikasi

- Tanggal & Waktu : 23 Februari 2023 13:40:25 | (Admin) Setuju = Permohonan disetujui
- Tanggal & Waktu : 23 Februari 2023 14:04:46 | (Verifikator) Setuju = Permohonan disetujui
- Tanggal & Waktu : 23 Februari 2023 14:20:50 | (Kabae) Setuju = permohonan disetujui

Informasi ORMAS

Surat Permohonan	AD(ART) Organisasi (PDF,MAX:10MB)
Unduh Surat Permohonan	Unduh AD(ART) Organisasi (PDF,MAX:10MB)
Nama ORMAS	Singkatan ORMAS
ikapor_batam	ikapor
No. WhatsApp	No. Kontak

Pilih Aksi  detail permohonan untuk melihat detail permohonan yang telah selesai diproses





Pemerintah Kota Batam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Thank you!

dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batam



bakesbangpolbatam.go.id

STUDI LAPANGAN KINERJA ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM



STUDI LAPANGAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

Kelompok III

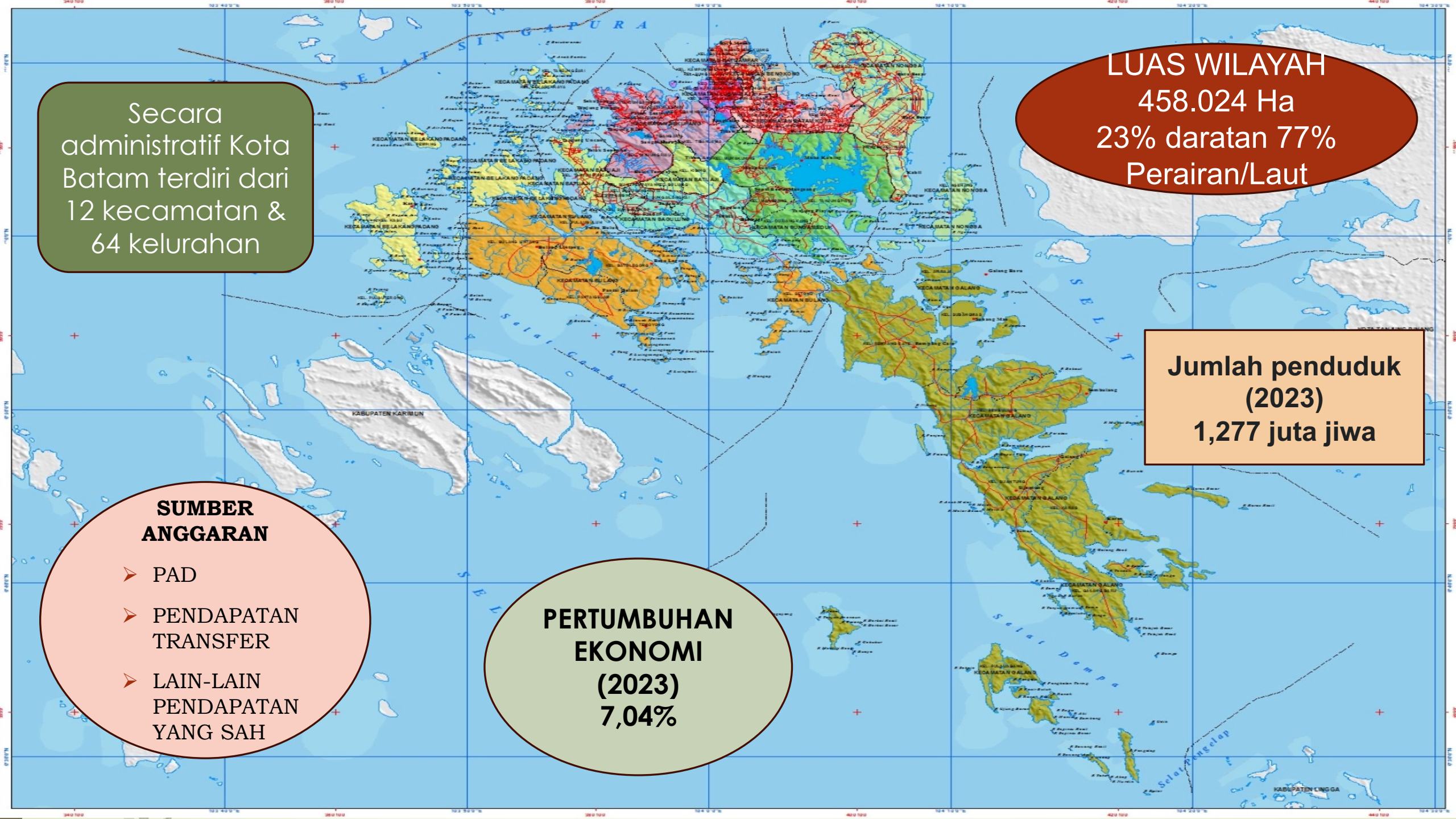
Oleh :

1. Dr. Dikko Alrahman, S.I.A., M.E (Ketua)
2. Budi Yanto, SE (Wakil Ketua)
3. Dian Yuti Rolanda, S.STP, MM (Sekretaris)
4. Desty Tirtayana Elha, SE, MM (Bendahara)
5. Amrullah, SE (Humas)
6. Rangga, SH, M.Si
7. Rafika Helda, SE, MM
8. Dedy Hartono, S.Sos, MM
9. Fera Sari, SH, MH

Pembimbing 1 : Dra. Sugiastuti, S.S, M.M

Pembimbing 2 : Dr. H. Farhat Syukri, SE, M.Si





Secara administratif Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan & 64 kelurahan

LUAS WILAYAH
458.024 Ha
23% daratan 77%
Perairan/Laut

Jumlah penduduk
(2023)
1,277 juta jiwa

SUMBER ANGGARAN

- PAD
- PENDAPATAN TRANSFER
- LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

PERTUMBUHAN EKONOMI
(2023)
7,04%

Visi dan Misi Kota Batam

VISI

**“TERWUJUDNYA BATAM
SEBAGAI BANDAR DUNIA
MADANI YANG MODERN
DAN SEJAHTERA”**

MISI

- ❖ Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diverifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah
- ❖ Mewujudkan Pembangunan Kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang
- ❖ Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia.
- ❖ Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah *hinterland* untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam
- ❖ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

DASAR HUKUM SOTK BADAN KESBANGPOL KOTA BATAM

Perda Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota
Batam

PERUBAHAN



Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Batam

Peraturan Walikota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,
Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan

Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja
di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

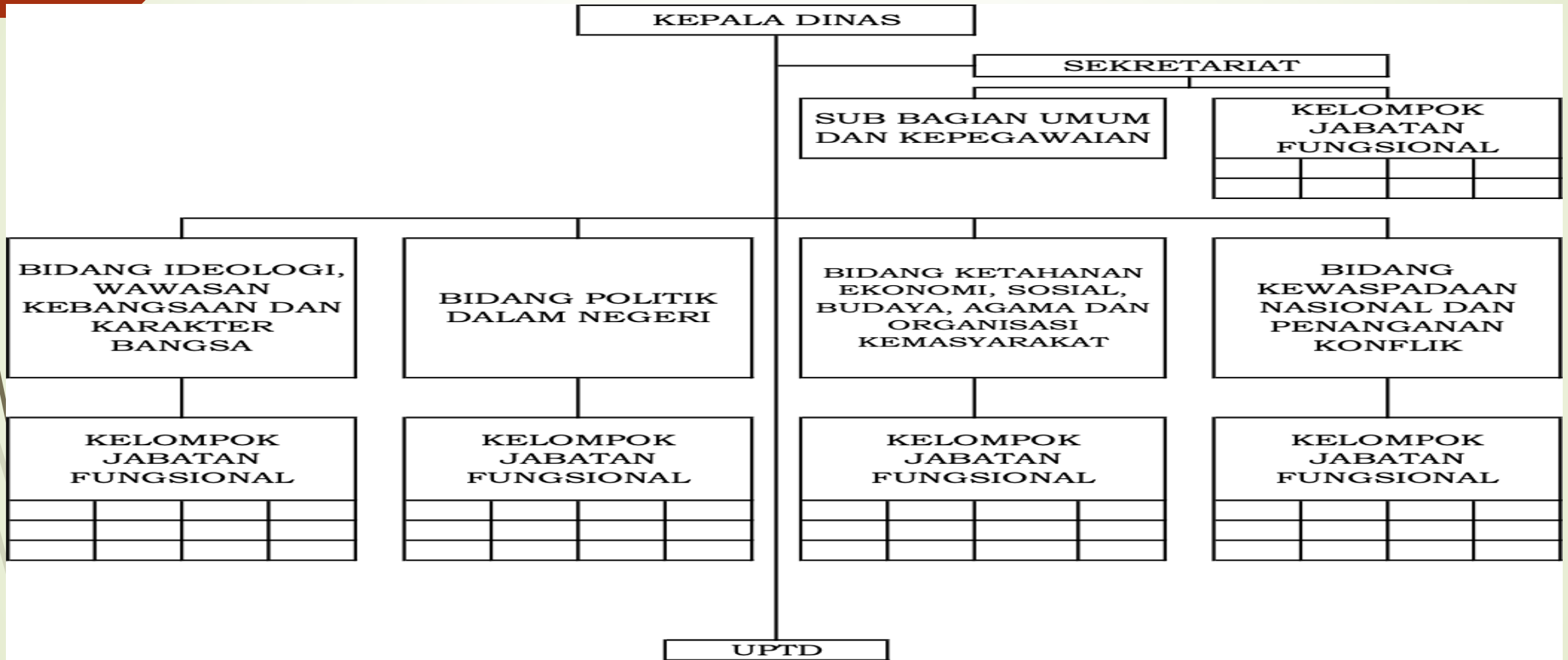
TUPOKSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

Tugas Pokok → membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Fungsi →

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM



WALI KOTA BATAM
dto
MUHAMMAD RUDI

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam

- Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan
- Persentase Masyarakat mendapatkan Pendidikan wasbang dan ideologi Pancasila
- Persentase partisipasi Masyarakat dalam pemilu dan pemilukada
- Partisipasi pemilih pemula
- **Persentase organisasi Masyarakat yang terdaftar/terverifikasi di Kesbangpol**
- Jumlah kebijakan Bersama FKUB yang dihasilkan.
- Indeks kerukunan hidup beragama di Kota Batam
- Persentase konflik yang terselesaikan
- Masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini

KEUNGGULAN (KEY SUCCESS FACTORS) STRATEGI & MANAJEMEN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

KEUNGGULAN STRATEGI

MELAKUKAN SOSIALISASI, DIALOG, SEMINAR, OUTBON, PAGELARAN SENI & BUDAYA KEPADA MASYARAKAT, PELAJAR, MAHASISWA SERTA ORGANISASI

RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTAR UMAT BERAGAMA & ANTAR SUKU KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

MENINGKATKAN PERAN & FUNGSI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM), TIM PEMANTAUAN PEMERINTAH DAERAH (POA)

MENINGKATKAN PERAN ORMAS & LSM SEBAGAI MITRA PEMERINTAH

KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN DALAM PERIODE 2021-2026

**MENINGKATKAN KUALITAS KADER PEMUDA
SEBAGAI PASUKAN PENGIBAR BENDERA
(PASKIBRA)**

**MENINGKATKAN PEMAHAMAN WAWASAN
KEBANGSAAN DI MASYARAKAT**

**MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM**

**MENINGKATKAN KUALITAS SDM DAN DATA
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Manajemen Kinerja Pelayanan Publik

Perencanaan
Kinerja

Pengukuran
Kinerja

Pelaporan
Kinerja

NILAI AKIP
2022

66,22
(KATEGORI "B")

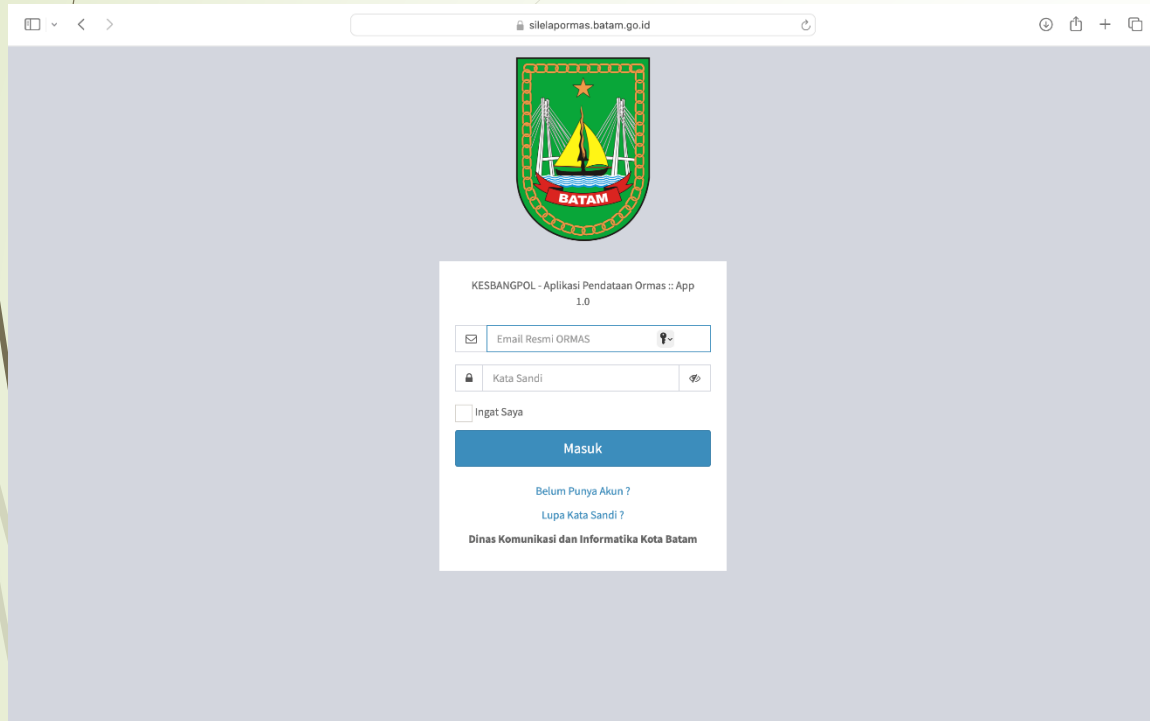
PEMETAAN PERMASALAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM TAHUN 2021-2026

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila, wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme - Maraknya Potensi Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Umum
	Kejadian konflik sosial di masyarakat masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> -Menurunnya Tingkat Toleransi Antar Umat Beragama -Kurangnya Pemahaman Tentang Demokratis, penegakan Hukum & HAM - Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat. - Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan
	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Peran Parpol Dalam Proses Penguatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Demokratis - Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis - Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu

LESSON LEARNT

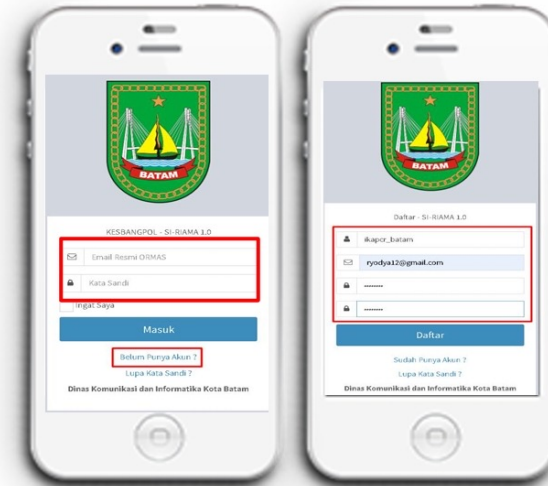


SILELAPORMAS (APLIKASI PELAPORAN ORMAS)



LOGIN AKUN

1. Isi field email dan Password
2. Klik Masuk untuk dapat Login
3. Klik Lupa Kata Sandi jika pengguna lupa password
4. Tautan lupa password akan dikirimkan melalui email yg telah diisi



Buka halaman silelapormas.batam.go.id

REGISTRASI AKUN

1. Klik belum punya akun untuk registrasi
2. Isi Field nama ormas, email, password dan konfirmasi password.
3. Klik Daftar.
4. Selanjutnya akun yg telah didaftarkan akan diaktifkan oleh admin.

Alamat: silelapormas.batam.go.id

Selamat Datang, ikapcr_batam.

Pendaftaran Telah Berhasil !
Untuk Mengaktifkan Akun, Silahkan Hubungi Administrator !

Keputusan Walikota Batam Nomor 454 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023

LESSON LEARNT HASIL STUDI LAPANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

APLIKASI
SILELAPORMAS

```
graph LR; A[APLIKASI SILELAPORMAS] --> B(PERAN KEPEMIMPINAN); A --> C(INOVASI PELAYANAN); A --> D(MANAJEMEN RISIKO); A --> E(PLANNING & BUDGETING); A --> F(PEMANFAATAN TEKNOLOGI);
```

The diagram illustrates the application of SILELAPORMAS across five key areas. A central red box labeled 'APLIKASI SILELAPORMAS' has five arrows pointing to five ovals on the right. The top oval, 'PERAN KEPEMIMPINAN', is outlined in red, while the others are outlined in green.

PERAN
KEPEMIMPINAN

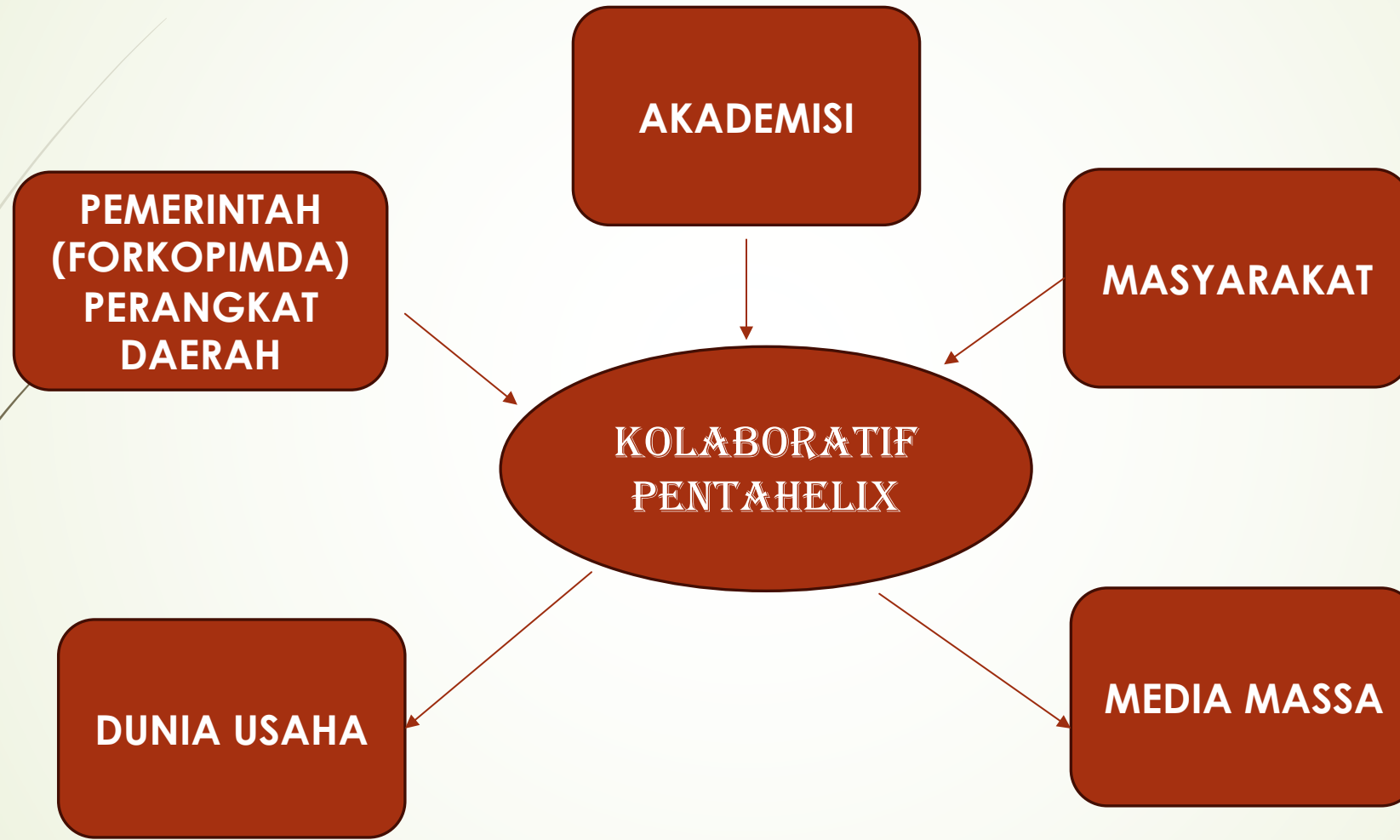
INOVASI PELAYANAN

MANAJEMEN RISIKO

PLANNING & BUDGETING

PEMANFAATAN
TEKNOLOGI

STAKEHOLDER



REKOMENDASI

- Mendorong Overall Vision dan Strategi Perencanaan yang holistic dan secara detail untuk pengembangan **SILELAPORMAS**
- Secara Bersinambungan Memperkuat Internal Political Desire dorongan/inisiatif dari dalam pemerintahan melakukan reformasi
- Meningkatkan eksternal pressure dalam mendukung keberlanjutan **SILELAPORMAS** dengan memfasilitasi tuntutan shekeholder

VIDEO STULA BADAN KESBANGPOL KOTA BATAM

Assalamu'alaikum



Kelompok III
LOKUS KESBANGPOL
KOTA BATAM

VIVAVIDEO

LINK VIDEO:

https://drive.google.com/file/d/1UyCQtIrx1Imqid2zbGzREdDUpgsHQRNA/view?usp=share_link

TERIMA KASIH



DOKUMENTASI STULA







